

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM
MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS MANAJERIAL
DI INSTITUT AGAMA ISLAM
NASIONAL LAA ROIBA BOGOR
JAWA BARAT

by Machmudah Umsida

Submission date: 20-Nov-2023 12:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 2232901723

File name: cek_plagiasi_sesi_2_mahmudah.docx (22.22K)

Word count: 2128

Character count: 14637

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS MANAJERIAL DI ³INSTITUT AGAMA
ISLAM NASIONAL LA A ROIBA BOGOR JAWA BARAT

Siti Mahmudah Noorhayati

PENDAHULUAN

Tata kelola perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk memberikan ruang kebebasan akademik dan ilmiah kepada anggota akademiknya, yang memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh sebagai sarjana dan ilmuwan yang luar biasa. Dalam konteks ini, gagasan tentang otonomi perguruan tinggi sangat relevan dengan upaya memastikan kualitas dalam proses pembelajaran dan hasil akhirnya. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa perguruan tinggi dapat memenuhi kewajiban akuntabilitasnya kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder (Saagari et al., 2015; Wright, 2007).

Konsep akuntabilitas ini menjadi sangat penting karena pendidikan tinggi perlu memberikan jaminan kepada setiap komponen perguruan tinggi bahwa institusi tersebut telah memberikan pendidikan yang berkualitas. Stakeholder dalam konteks organisasi pendidikan tinggi mencakup masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi itu sendiri.

Berbagai komponen yang menjadi akuntabilitas kinerja (managerial) perguruan tinggi, mengacu pada UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi terdiri atas komponen-komponen utama dan penunjang di pendidikan tinggi, yang pada dasarnya mencakup komponen utama yaitu : 1) proses pembelajaran, 2) kurikulum, 3) dosen, 4) fasilitas pembelajaran, 5) pendanaan, dan 6) penelitian, yang didukung oleh supporting components atau komponen pendukung yaitu: 1) manajemen dan 2) kepemimpinan.

Realisasi akuntabilitas ini menekankan perlunya perguruan tinggi memiliki perencanaan yang terstruktur dan penerapan yang jelas. Ini dimulai dengan merumuskan visi, misi, tujuan, serta target-target yang konkret, dan strategi untuk mencapainya. Selain itu, perguruan tinggi juga harus memiliki struktur pengelolaan yang efisien, kepemimpinan yang kuat, dan sistem penjaminan mutu yang efektif. Fokus pada komponen mahasiswa dan lulusan merupakan hal yang krusial, yang berkontribusi pada proses pembelajaran dan memastikan tingkat kualitas lulusan yang baik (Ida, Hayu Dwimawanti; Amni, 2016; Meutia & Daud, 2021; Yasin & Mustafa, 2020).

Sayangnya, banyak dijumpai lemahnya daya saing perguruan tinggi nasional yang merupakan akibat dari kualitas pelayanan masih rendah serta pengelolaan dan tata kelola yang kurang efektif di dalamnya. Sebagai lembaga publik, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan publik di bidang pendidikan (Bernikova, 2017; Diyah, 2017; Kim et al., 2014). Perguruan tinggi di Indonesia, baik yang bersifat negeri maupun swasta, diharapkan memiliki kemampuan untuk bersaing baik di taraf nasional, regional, maupun internasional. Untuk dapat bersaing secara efektif, setiap perguruan tinggi harus mampu merespons dengan cepat perubahan yang terjadi di lingkungannya dan memenuhi kebutuhan para pelanggannya.

Perubahan ini harus berfokus pada upaya untuk mencapai daya saing yang berkelanjutan. Hal ini membutuhkan personal yang kuat, potensial atau sumber daya yang bisa dimanfaatkan secara individu maupun dalam kerangka sebuah organisasi. Mereka harus memiliki kemampuan dan semangat untuk bekerja dengan cerdas, kompetitif, dan bersifat kolaboratif, demi kepentingan dan kemajuan institusi perguruan tinggi (Hidayah et al., 2015; Nguyen et al., 2017; R.Strickland, 2001; Saagari et al., 2015; Taufik, 2020).

Sumber daya manusia, termasuk dosen dan staf pendidik lainnya, memiliki peran sentral dalam meningkatkan kapabilitas perguruan tinggi secara keseluruhan. Aspek-aspek seperti kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan akademik juga harus diperhatikan dengan serius. Semua ini, tentu saja, memerlukan dukungan finansial yang memadai, fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta sistem informasi yang terintegrasi. Untuk mencapai visi dan misi institusi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Semua langkah ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola universitas, otonomi, akuntabilitas, dan citra publik perguruan tinggi tersebut.

Kualitas dan relevansi lulusan pendidikan tinggi agama Islam, masih menjadi faktor utama lemahnya daya saing bangsa di kancah perdagangan bebas. Terpuruknya ekonomi bangsa ini, disebabkan oleh rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM) yang mengelola sumber ekonomi. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam perubahan ekonomi, yang mampu menciptakan sumber daya yang berkualitas yang memiliki seperangkat skill/keterampilan serta mampu berdaya saing dalam persaingan global.

Dalam rangka menunjukkan akuntabilitas, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta perlu secara berkala menyusun laporan mengenai pelaksanaan dan penggunaan dana yang mereka terima. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran kepada pihak yang memberikan dana, termasuk pemerintah dan masyarakat (Anderson, 2017; Arokiasamy et al., 2014; Bush, 2017; Hulu et al., 2020). Di perguruan tinggi swasta, laporan semacam ini juga harus disampaikan kepada Yayasan Penyelenggara Pendidikan dan kemudian dibagikan kepada para stakeholder atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti pemerintah dan masyarakat yang berkontribusi pada pendidikan tersebut.

Selain sangat bergantung pada kondisi internal dan tata kelola organisasi di dalam setiap perguruan tinggi, akuntabilitas publik dan penjaminan mutu perguruan tinggi juga dipengaruhi oleh interaksi perguruan tinggi dengan masyarakat di luar. Sebagai lembaga publik, perguruan tinggi seharusnya terbuka dan responsif terhadap kontrol eksternal. Mereka tidak boleh menutup diri terhadap tuntutan, dinamika, dan mekanisme kontrol yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas dan penjaminan mutu di perguruan tinggi juga dipengaruhi oleh sejauh mana perguruan tinggi memberikan akses kepada masyarakat dan lembaga penjamin mutu untuk melakukan pengawasan dan evaluasi.

Pemimpin memegang peran sangat penting dalam perkembangan suatu organisasi karena kesuksesan organisasi, pada dasarnya, sangat bergantung pada kemampuan dan pengaruh pemimpinnya (Bassem E. Maamari Joelle F. Majdalani, 2017; Mediarita, Agustina; Muhammad, 2021; Purwanto et al.,

2020; Shrestha, 2019). Meskipun organisasi memiliki sumber daya yang berkualitas tinggi, tanpa adanya seorang pemimpin, tujuan organisasi tidak akan tercapai. Dalam konteks ini, seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan serta motivasi kepada anggota timnya, sehingga mereka termotivasi untuk bekerja mencapai tujuan dan target organisasi secara optimal. Kepemimpinan yang efektif akan mencerminkan dalam keberhasilan manajemen sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada keberhasilan aspek pendidikan. Dengan kata lain, jika seorang pemimpin di dalam sebuah institusi pendidikan mampu memotivasi stafnya dengan baik, maka pemimpin tersebut dianggap mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif (Ansar et al., 2019; Hidayah et al., 2015; Nguyen et al., 2017; Nimota et al., 2020; Prestiadi et al., 2019; Sun & Henderson, 2017).

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) pada dasarnya merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh masyarakat dengan tujuan utama untuk menghasilkan individu yang kompeten dalam bidang agama Islam dan yang juga memiliki dampak positif pada masyarakat. Selain itu, PTKIS juga bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya Islam guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta memperkaya warisan budaya nasional. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang dikelola dan dijalankan oleh masyarakat, PTKIS telah berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah PTKIS, peran mereka dalam mencerdaskan bangsa semakin kuat, sehingga seharusnya pemerintah menghargai peran strategis yang telah lama dimainkan oleh PTKIS dan tidak lagi mengabaikannya.

Permasalahan yang sering dijumpai dan muncul pada PTKIS sangat kompleks, mulai dari infrastruktur, mahasiswa, pembiayaan, proses akademik, dan kualitas lulusan. Dari segi infrastruktur, walaupun pada umumnya PTKIS telah memiliki kampus, namun bervariasi antara yang berada di tanah milik dilengkapi dengan bangunan dan sarana yang memadai, namun ada juga yang masih menyewa, atau di kampus sendiri namun sarannya masih sederhana dan terbatas. Kampus PTKIS yang berada di pondok pesantren sangat ideal, namun mahasiswa yang mondok di pesantren terbatas jumlahnya

Situasi ini mengakibatkan sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia masih belum menjalankan prinsip akuntabilitas dengan baik. Ini berarti mereka belum mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Perguruan tinggi seharusnya tidak hanya mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dalam memahami pentingnya pendidikan tinggi. Agar mencapai tingkat akuntabilitas yang memadai, diperlukan kesepahaman bersama dan konsistensi dalam kebijakan antara semua pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi. Hal ini akan memastikan bahwa manajemen akuntabilitas di perguruan tinggi tidak mengalami kemunduran

Akuntabilitas manajerial bagi PTKIS menjadi tuntutan untuk mengukur aktivitas yang telah, sedang dan akan dilakukan sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Banyak faktor yang menjadi pemicu terwujudnya akuntabilitas manajerial perguruan tinggi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, masalah-masalah yang menjadi penghambat terwujudnya kualitas PTKIS meliputi faktor internal dan eksternal

Isu-isu yang disebutkan di atas memiliki dampak terhadap masalah kualitas yang belum optimal, baik dalam konteks kelembagaan maupun dalam hal hasil lulusan dari PTKIS. Namun, positifnya, hasil

akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa PTKIS tidak mendapatkan akreditasi yang buruk. Walaupun sebagian besar PTKIS belum mencapai tingkat akreditasi tertinggi, yaitu A, sebagian besar berada pada kategori sedang, yaitu antara B dan C.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas manajerial PTKIS di wilayah II Kopertais Jawa Barat. Dari uraian di atas, kepemimpinan, pendanaan pendidikan, dan kualitas proses pendidikan dan infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas manajerial, yang pada akhirnya akan menentukan kemampuan PTKIS dalam bersaing. Keempat faktor ini sangat terkait dengan aspek utama dalam pengelolaan PTKIS di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor Jawa Barat dan sekaligus menentukan apakah perguruan tinggi tersebut dianggap akuntabel atau tidak.

LANDASAN TEORI

Definisi dan teori yang berkenaan dengan kepemimpinan sangat variatif tergantung pada sudut pandang mana individu membidik. Stoner, misalnya, mendeskripsikan kepemimpinan manajerial sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi terhadap aktivitas pada anggota satuan kelompok yang saling terkoneksi tugas dan fungsinya (Alam et al., 2019; Nguyen et al., 2017; Sivanathan & Cynthia Fekken, 2002; Sun & Henderson, 2017). Slatter, Lovett, dan Barlow menyatakan bahwa kepemimpinan melibatkan serangkaian proses yang bertujuan menciptakan organisasi menjadi yang terdepan atau menyesuaikan diri dengan perubahan signifikan dalam lingkungan. Kepemimpinan ini menentukan arah masa depan, membimbing individu menuju visi dan misi, serta memberikan inspirasi untuk mencapai visi tersebut, meskipun dihadapi dengan berbagai hambatan (Herminingsih, 2021, 2021; Sivanathan & Cynthia Fekken, 2002).

Kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin melibatkan: (1) kemampuan untuk merumuskan arah atau tujuan organisasi, (2) kemampuan untuk mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan, (3) keterampilan dalam memotivasi dan menginspirasi para pegawai, (4) kemampuan membangun kepercayaan diri, dan (5) kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan (Ismail et al., 2018; Maria Eliophotou, 2016; Prestiadi et al., 2019).

Akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab bagi para aparatur pemerintah atau pelayan publik untuk bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas semua tindakan dan kebijakan yang mereka tetapkan. Ini merupakan ukuran yang menunjukkan apakah kegiatan birokrasi publik atau layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah (organisasi publik) sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta apakah layanan publik tersebut berhasil memenuhi kebutuhan sebenarnya dari rakyat. Lembaga pemerintah atau organisasi yang memiliki tugas utama melayani rakyat harus memiliki tanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap rakyat (BPKP, 2000; Handayani & Rasyid, 2015).

Tujuan penerapan akuntabilitas publik adalah untuk menetapkan sasaran organisasi yang tepat, mengembangkan standar pencapaian tujuan secara ekonomis dan efisien, serta menyediakan informasi tentang penerapan standar yang telah diadopsi oleh yayasan. Manfaat dari akuntabilitas meliputi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi, mendorong responsif dan transparansi

organisasi, merangsang partisipasi masyarakat, memastikan operasional organisasi secara efektif, efisien, dan responsif terhadap umpan balik masyarakat, serta meningkatkan penilaian kinerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Anderson, 2017; Meutia & Daud, 2021; Yasin & Mustafa, 2020)

Akuntabilitas manajerial merujuk pada kewajiban lembaga publik untuk mengelola organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Sementara itu, akuntabilitas manajerial juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja (performance accountability). Konsep akuntabilitas manajerial juga terkait dengan akuntabilitas proses (process accountability), yang berarti bahwa setiap proses dalam organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terjadi ketidakefisienan dan ketidakwajaran dalam operasional organisasi (Anderson, 2017; Meutia & Daud, 2021; Yasin & Mustafa, 2020)

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya, secara menyeluruh. Penelitian ini menggambarkan fenomena tersebut yang dituangkan dalam bentuk kata dan bahasa, menciptakan deskripsi yang holistik secara kontekstual dengan menggunakan berbagai metode alamiah. Definisi jenis penelitian ini sesuai dengan interpretasi Sugiyono yang menganggap bahwa metode penelitian ini meneliti obyek alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (gabungan berbagai sumber), analisisnya bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015; Moleong, 2018).

Subjek penelitian ini terdiri dari rektor dan atau wakil rektor, ketua program studi dan kepala lembaga. Mengingat luasnya subyek penelitian ini, maka penulis menetapkan sebagai informan penting dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) informan. Untuk mendapatkan informasi akurat terkait objek penelitian, penulis akan melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen. Observasi difokuskan pada serangkaian kegiatan menelaah dan memperhatikan dengan cermat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan keterhubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti dalam penelitian ini sepenuhnya bertindak sebagai pengamat (complete observer technique), yang berarti hanya terlibat dalam pengamatan, pengambilan gambar (foto), dan penyusunan catatan mengenai fenomena yang terjadi. Pengamatan dilakukan untuk menggali informasi mengenai Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Manajerial.

Menurut Bogdan, analisis data kualitatif adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi fenomena kompleks yang dilakukan dengan cara bekerja berdasarkan data, melakukan pengorganisasian data, menyusunnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, menyintesis, mengidentifikasi pola, menemukan aspek yang penting dan yang dipelajari, serta menentukan informasi apa yang dapat diungkapkan kepada orang lain. Dalam konteks penelitian ini, proses analisis data kualitatif mengikuti tahapan yang diusulkan oleh Mc. Drury, yaitu:

1

a. Membaca atau mempelajari data, menandai key word/kata kunci, dan gagasan/ide yang terdapat dalam data.

b. Memahami key word/kata kunci tersebut dan berusaha menemukan tema yang muncul dari data.

c. Menerapkan sistem koding.

d. Melakukan analisis.

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS MANAJERIAL DI INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR JAWA BARAT

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Firman Syah. "Mengenal Jejak Peninggalan Prabu Siliwangi di Kampung Adat Urug", Destinesia : Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata, 2019
Publication 2%
- 2** Mulyo No. "Implementasi Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran ISMUBA", MUDARRISA: Journal of Islamic Education, 2015
Publication 2%
- 3** Diah Nur Afriyanti, Saepudin Saepudin, Iim Suryahim, Yanti Hasbian Setiawati. "Pengaruh Karakter Siswa dan Motivasi Belajar terhadap Kompetensi Belajar Akidah Akhlak Siswa Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Kuningan", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2023
Publication 1%
- 4** Akhmad Akhmad, Indriono Hadi, Askrening Askrening, Ismail Ismail. "EFEKTIVITAS TERAPI 1%

SPRITUAL SHALAT DAN DZIKIR TERHADAP KONTROL DIRI KLIEN PENYALAHGUNAAN NAPZA", Health Information : Jurnal Penelitian, 2019

Publication

5

Fitri Ella Fauziah. "Diversitas Gender dan Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Intervening", Media Ekonomi dan Manajemen, 2018

Publication

<1 %

6

Hermawan Purwo Sasmito, Muhammad Hanif. "Kehidupan Sosial Ekonomi Juru Pelihara Situs Cagar Budaya Di Madiun Tahun 2013", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2014

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On